



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 360 /2023

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/005/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Bupati Tabalong Nomor 800.1.3.3/131-KEP.MPKA/BKPSDM tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, sehingga terdapat perubahan pada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk kembali pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/005/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/005/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/346/2023 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/005/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2023, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 41 pada kolom 3 diubah sehingga Nomor Urut 41 pada kolom 3 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 14 Agustus 2023

BUPATI TABALONG, 



PANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
 3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
-

DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

| NO. | NAMA SKPD | PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN | NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN | | | KETERANGAN |
|-----|---|--|--|--|------------|------------|
| | | | PENGELUARAN | BENDAHARA | PENERIMAAN | |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Drs. TONIE MARWAN, M.Pd NIP. 19660317 199412 1 006 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | AHMAD REDHANI, A.Md.Ak NIP.19810323 201001 1 019 Staf Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | ANDRI FATMAWATI, S.AP NIP. 19840425 201001 2 024 Staf Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 5 | 6 |
| 2 | Dinas Kesehatan | dr. H. TAUFIQURRAHMAN HAMDIE, M.Kes NIP.19700720 200212 1 004 Kepala Dinas Kesehatan | H. HEFZI RAHMAN, AMK NIP.19880325 201101 1 011 Staf Fungsional Dinas Kesehatan | LISNA SARI, A.Md NIP.19810221 201408 2 003 Staf Fungsional Dinas Kesehatan | | |
| 3 | RSUD H.Badaruddin Kasim | dr. H. MASTUR KURNIAWAN, MM NIP.19720109 200604 1 019 Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim | EKA SAMIANA ELPA, A.Md NIP.19850111 201101 2 012 Staf Fungsional RSUD H. Badaruddin Kasim | HASAIRIN NOR, A.Md NIP.19800920 201101 1 006 Staf Fungsional RSUD H. Badaruddin Kasim | | |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | H. WIBAWA AGUNG SUBRATA, ST, MT NIP.19680714 199703 1 004 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | H. HARIS FADILLAH NIP.19691010 199303 1 011 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | RAHMANI, ST NIP.19780424 201101 1 004 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | |
| 5 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | ERFIN NIRZA SIREGAR, ST NIP.19710928 200003 1 003 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | RAMADHANIANSYAH, A.Ma NIP.19830702 200312 1 004 Staf Fungsional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | |
| 6 | Dinas Perhubungan | TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT NIP. 19780805 199612 1 002 Kepala Dinas Perhubungan | NOOR HIDAYATULLAH, A.Md.AK NIP.19810516 200801 1 019 Staf Fungsional Dinas Perhubungan | HUSNI THAMRIN, A.Md.AK NIP.19800713 200604 1 013 Staf Fungsional Dinas Perhubungan | | |
| 7 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | H. M. NOOR RIFANI, SH, ST, MT NIP.19721220 199803 1 008 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | SUSILAWATI, S.AP NIP.19801019 200701 2 004 Staf Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | | | |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | H. SLAMET RIYADI, ST NIP.19670815 199603 1 004 Kepala Dinas Lingkungan Hidup | NOVIANSYAH, A.Md NIP.19831115 200801 1 017 Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup | SELAMET RAMADAN, A.Md.Ak. NIP.19820210 201001 1 029 Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup | | |
| 9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Ir. ROWI RAWATIANICE, M.T NIP.19661125 199403 2 003 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | MARIA ESTER YELLYTA, A.Md NIP. 19850609 201101 2 014 Staf Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|--|---|--|---|
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | Drs. H. RUSMADI, MM NIP.19671030 199303 1 007 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | ERVANA AISYAH FERNANDA, A.Md.Ak NIP.19970724 202203 2 001 Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | | |
| 11 | Dinas Sosial | Drs. H. ABU BAKAR SIDIQ NIP.19670720 199103 1 014 Kepala Dinas Sosial | FITRI AISYAH, S.Ak NIP. 19850205 200904 2 001 Staf Fungsional Dinas Sosial | | |
| 12 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | H. SURYANADIE, S.Sos, M.Si NIP.19641215 198602 1 006 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | HAZATUL LAILA, S.A.P NIP. 19790116 200701 2 024 Staf Fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | BASIH PRIHATIN, SE NIP. 19850223 201408 2 001 Staf Fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 13 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | ABDUL HALIM, S.STP NIP.19820420 200112 1 001 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | WERIANSYAH, S.AP NIP. 19810720 200501 1 007 Staf Fungsional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | FARIDA RINAWATI, S.AP NIP. 19770823 201001 2 003 Staf Fungsional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP, M.Si NIP.19780910 199711 1 001 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | AULJA RAHMAN NIP. 19830211 201212 1 003 Staf Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | |
| 15 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Drs. H. TAZERIYANOR, MA NIP.19671104 198903 1 011 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | DEDY RAHMADI NIP.19821207 200501 1 005 Staf Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | | |
| 16 | Sekretariat Daerah | Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST., MT NIP.19670518 199803 2 004 Sekretaris Daerah | MAHFUD NASRUDIN, A.Md.Ak NIP.19850622 201001 1 021 Staf Fungsional Sekretariat Daerah | M. MANSYUR, A.Md.Ak NIP.19830610 200701 1 003 Staf Fungsional Sekretariat Daerah | |
| 17 | Sekretariat DPRD | Drs. ARBUANSYAH, M.A NIP.19730207 199311 1 003 Sekretaris DPRD | IRHAMSYAH, A.Md NIP. 197904112 200904 1 002 Staf Fungsional Sekretariat DPRD | | |
| 18 | Badan Pendapatan Daerah | Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si NIP. 19720306 199203 1 004 Kepala Badan Pendapatan Daerah | EDI RAHMAN, SE NIP. 19840911 201001 1 015 Staf Fungsional Badan Pendapatan Daerah | ARIYANTI NIP. 19810323 200701 2 004 Staf Fungsional Badan Pendapatan Daerah | |
| 19 | Inspektorat Daerah | Drs. M ZAINAL ARIFIN, M.Ec.Dev NIP.19730202 199301 1 001 Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong | SUMIATI NIP. 19801130 200712 2 006 Staf Fungsional pada Inspektorat Daerah | | |
| 20 | Kecamatan Tanjung | Drs. ROFIK AZIDDIN, ME NIP.19731212 199903 1 009 Camat Tanjung | KARTIKA ALFAUZAWATI, A.Md.Ak NIP. 19980421 202012 2 004 Staf Fungsional Kecamatan Tanjung | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|--|---|--|---|
| 21 | Kecamatan Murung Pudak | ABDUL WAHID, SE.Kp NIP.19770717 199903 1 008 Camat Murung Pudak | NUR HALIDA, A.Md NIP.19961220 202012 2 019 Staf Fungsional Kecamatan Murung Pudak | -- | |
| 22 | Kecamatan Tanta | ADY FAZAR, S.Sos, S.H, M.H, Kp NIP.19781110 200112 1 003 Camat Tanta | TABERANI NIP.19730309 200906 1 006 Staf Fungsional Kecamatan Tanta | -- | |
| 23 | Kecamatan Muara Harus | H. ADITYAPULA NUGRAHA, S.STP, M.IP NIP.19861223 200602 1 001 Camat Muara Harus | MAHMUDI HAKKI NIP.19820215 200701 1 005 Staf Fungsional Kecamatan Muara Harus | -- | |
| 24 | Kecamatan Banua Lawas | H. FARIDUDDIN, S.AP, MA NIP.19680105 198903 1 011 Camat Banua Lawas | INTAN PERMATA SARI, A.Md NIP.19941207 202012 2 026 Staf Fungsional Kecamatan Banua Lawas | -- | |
| 25 | Kecamatan Kelua | H. SUWANDI, S.Sos, MAP NIP.19680705 198903 1 016 Camat Kelua | IKBAR NIP.19790520 200604 1 015 Staf Fungsional Kecamatan Kelua | -- | |
| 26 | Kecamatan Pugaan | H. RONY SAPUTRA, S.STP, M.IP NIP.19850918 200312 1 002 Camat Pugaan | NOVITA SARI, A.Md.Pjk NIP.19960508 202012 2 021 Staf Fungsional Kecamatan Pugaan | -- | |
| 27 | Kecamatan Jaro | SAKAM, S.STP NIP.19820921 200212 1 001 Camat Kelua | SAIBANI NIP.19680206 200701 1 029 Staf Fungsional Kecamatan Jaro | -- | |
| 28 | Kecamatan Muara Uya | H. SUNARDI, SE, Kp NIP.19860205 198903 1 011 Camat Muara Uya | HARTONO NIP.19751028 200501 1 013 Staf Fungsional Kecamatan Muara Uya | -- | |
| 29 | Kecamatan Haruai | HANDI YANUARDI, S.IP, MA NIP.19880113 200701 1 001 Camat Haruai | RAHMAN HAKIM NIP.19871109 200701 1 001 Staf Fungsional Kecamatan Haruai | -- | |
| 30 | Kecamatan Upau | AGUSTIAN, SE, Kp NIP.19830809 200501 1 004 Camat Upau | AGI BUDIPRANATA, A.Md NIP.19970802 202012 1 006 Staf Fungsional Kecamatan Upau | -- | |
| 31 | Kecamatan Bintang Ara | MULYADI, S.Sos, Kp NIP.19690610 200012 1 005 Camat Bintang Ara | FANY TANDIOPANG, A.Md.Pjk NIP.19970718 202012 2 014 Staf Fungsional Kecamatan Bintang Ara | -- | |
| 32 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Dr. HUSIN ANSARI, SE, ME NIP.19800610 200501 1 014 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | HAIRUL FAHMI, SE NIP.19850718 200312 1 007 Staf Fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | KELSEY SWASTARI, A.Md NIP.19860917 201503 2 005 Staf Fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---|--|--|--|---|
| 33 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | H. RUSMADI, S.AP NIP.19650129 198602 1 006 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | I'IS KHORINA, A.Md NIP.19871227 201101 2 014 Staf Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | |
| 34 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | FAHRUL RAJJI, S.Pi., M.AP. NIP.19691111 199703 1 006 Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | MUHAMAD RUSDI, A.Md.Ak NIP.19820111 200701 1 006 Staf Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | AKHMAD JAYADI NIP.19740518 200701 1 016 Staf Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
| 35 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dr. H. ERWAN, SH, M.AP NIP.19660921 198703 1 009 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | AIS RAHMAD, A.Md.Ak NIP. 19830625 200801 1 012 Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | |
| 36 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Hj. NORHAYATI, SE., M.Si NIP.19690203 199803 2 005 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | PITRI HERIAWATI NIP. 19830413 201212 2 002 Staf Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | |
| 37 | Dinas Perkebunan dan Peternakan | SOLEH, SP. NIP. 19700217 199503 1 002 Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan | NONY AGUSTINA, A.Md NIP. 19820802 200904 2 003 Staf Fungsional Dinas Perkebunan dan Peternakan | KHALIWANI NIP. 19760618 199603 1 002 Staf Fungsional Dinas Perkebunan dan Peternakan | |
| 38 | Dinas Tenaga Kerja | HERWANDI, S.Pd, M.AP NIP.19640925 198804 1 002 Kepala Dinas Tenaga Kerja | DESSY HERAWATI, SE NIP. 19831225 201101 2 013 Staf Fungsional Dinas Tenaga Kerja | RAMADANI, S.AP NIP. 19960206 202203 1 001 Staf Fungsional Dinas Tenaga Kerja | |
| 39 | Dinas Komunikasi dan Informatika | ARIANTO, S.IP, M.Si NIP. 19680515 199003 1 008 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | AYANG SAFITRI, S.Kom NIP. 19791026 200904 2 001 Staf Fungsional Dinas Komunikasi dan Informatika | ERWAN HAMSANI, S.Kom NIP.19780718 200901 1 006 Staf Fungsional Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 40 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | H. SYAM'ANI, SP, MP NIP.19750504 200003 1 012 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | IRLIANSYAH, A.Md.Ak NIP. 19800313 200701 1 007 Staf Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Hj. HADARIAH, S.AP NIP.19780525 201001 2 010 Staf Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | |
| 41 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | HARIS FAKHROZI, ST, MT NIP.19721024 200501 1 004 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | HERIYADI RUSDIN, A.Md NIP.19780921 201001 1 011 Staf Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | |

BUPATI TABALONG.



PANANG SYAKHFIANI

A 70